

## KASUS AHOK DALAM PERSPEKTIF ILMU LINGUISTIK

**Agwin Degaf**

agwindegaf10@gmail.com

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### ABSTRAK

Tulisan ini hendak mengangkat tema terkait maraknya berita tentang kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pidatonya di kepulauan seribu beberapa waktu lalu. Secara sederhana, penulis ingin mengupas kalimat/tuturan Ahok yang dianggap telah melukai hati umat muslim. Ujaran Ahok yang dianggap menistakan tersebut akan dilihat dengan menggunakan kacamata linguistik, yaitu dari segi sintaksis, semantik, dan pragmatik. Secara sintaksis, yang akan dilihat adalah konstruksi kalimat pasif-aktif dalam salah satu tuturan yang dianggap sebagai bentuk penistaan oleh khalayak. Sudut pandang tata bahasa tersebut kemudian akan diperkuat dengan analisis makna, yaitu terkait dengan makna emotif yang dapat dibangkitkan oleh sebuah kata. Makna emotif inilah yang kemudian memicu kemarahan khalayak atas ujaran Ahok. Analisis selanjutnya adalah terkait siapa yg berbicara dan berbicara apa atau oleh van Dijk (2004) disebut sebagai *US vs THEM*. Perihal pelabelan mengenai siapa yang dianggap sebagai "kita" dan yang dianggap sebagai "mereka" ini juga membawa konsekuensi tersendiri atas ujaran yang diucapkan oleh Ahok tersebut. Terakhir, analisis terkait konteks dari suatu ujaran juga akan disertakan dalam tulisan ini. Analisis bahasa yang komprehensif terkait kasus Ahok diharapkan dapat memberikan jawaban alternatif terkait apakah tuturan Ahok di kepulauan seribu merupakan suatu bentuk penistaan atau bukan. Dengan demikian, analisis terhadap teks semata dianggap tidak cukup, sehingga peranan konteks dan faktor-faktor di luar teks menjadi teramat penting dalam kasus ini.

**Kata Kunci:** kasus Ahok, sintaksis, semantik, pragmatik

### 1. Pendahuluan

Kasus penistaan Agama oleh Ahok rupanya sedang menjadi primadona di berbagai media. Selepas aksi damai 411-pun, pembicaraan mengenai kasus tersebut belum juga usai. Di media sosial facebook, mayoritas pemilik akun

masih membagikan tautan artikel mengenai kasus tersebut. Aplikasi media sosial yang sifatnya lebih privat, seperti *whatsapp*, juga tidak luput dari sebaran berita-berita terkait kasus Ahok, sebelum akhirnya berita mengenai kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika (sempat) mengambil alih. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rahardjo (2007: 74) bahwa satu wacana (prior discourse) mengajukan klaim kebenaran, sedangkan wacana lain melakukan kritik atau penyerangan (counter-discourse), untuk selanjutnya dibalas lagi oleh wacana pertama dalam bentuk pembelaan (apologetic discourse), atau malah serangan balik (counter-counter discourse). Hal inilah yang sedang terjadi saat ini. Berita maupun artikel yang sifatnya saling balas, tampak lalu lalang di berbagai jenis media sosial. Sampai-sampai khalayak menjadi bingung dan mempertanyakan keakuratan dan kebenaran dari isi berita maupun artikel itu.

Tidak hanya berita dan artikel yang berisi perkembangan kasus penistaan agama Ahok. Tulisan-tulisan yang isinya kurang bernalar juga mengambil peran dalam perang wacana tersebut. Artikel seperti "munculnya tulisan Allah di langit", "peluru belok sendiri", "cuaca mendung yang mendukung", dan semacamnya, turut serta meramaikan jagad media sosial. Hal tersebut tampaknya sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia yang rumusannya berasal dari Auguste Comte (dalam Suriasumantri, 2009: 64). Singkatnya, pemikiran manusia yang awalnya teologis, berkembang ke arah metafisis, untuk kemudian menjadi positif. Teologi seperti yang kita ketahui bersama, adalah penjelasan mengenai gejala yang mengacu pada Tuhan. Metafisis merupakan transisi dari teologi ke positif, dimana penjelasan mengacu pada kekuatan-kekuatan impersonal dan tidak lagi mengacu kepada Tuhan atau Dewa. Sedangkan positif, tentu saja mengacu pada gejala-gejala itu sendiri. Nah pola pikir barat dengan pola pikir kita, sangat berbeda. Mereka (barat) memberikan porsi lebih besar pada tataran positif, sementara porsi keTuhanannya semakin sedikit. Kebalikannya, pola pikir kita lebih menekankan pada Tuhan, atau boleh dikatakan bahwa porsi teologis kita lebih besar dari porsi positif. Contoh kasarnya, ketika sakit, orang barat langsung ke dokter (by research), sementara kita (biasanya) memilih untuk menahan rasa sakitnya dengan berdo'a, pergi ke pengobatan alternatif, minta disuwuk, dsb. Karena itu, ketika Ponari muncul dengan batu ajaibnya, berbondong-bondong orang-orang sakit ingin disembuhkan dengan air celupan batu. Sebenarnya, tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk dari pola pikir tersebut, keduanya sama saja asal digunakan dengan bijaksana. Pola pikir semacam ini yang menyebabkan masyarakat kita

gampang panas jika sudah membahas agama. Parahnya, hal itu seringkali dibidik oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang selalu "jualan ayat" demi memuluskan syahwat politiknya. Sungguh sangat disayangkan jika Negara lain sudah saling bersaing di bidang teknologi, sementara kita masih disibukkan dengan menganalisa tulisan-tulisan yang muncul di daun, jidat, kulit binatang, bebatuan, langit, dan lain sebagainya.

Terkait dengan maraknya berita tentang kasus Ahok yang beredar belakangan ini, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dianalisa dengan menggunakan perspektif linguistik (ilmu bahasa). Tulisan ini secara sederhana berusaha mengupas kalimat/tuturan Ahok yang dianggap telah melukai hati umat muslim sehingga penyelesaian kasusnya-pun menjadi berlarut-larut. Sebenarnya, beberapa pakar bahasa sudah banyak yang memberikan pandangan terkait dengan kasus penistaan agama oleh Ahok, baik yang menganggap ujaran Ahok tersebut sebagai bentuk penistaan, maupun yang menyanggahnya. Bambang Kaswanti Purwo (BKW) misalnya, seperti dalam rilis berita yang dimuat *tribunnews.com* (29/03/2017), mengatakan bahwa pidato Ahok dikeulauan Seribu bukanlah suatu bentuk penistaan. Dalam penelitiannya terhadap kalimat pidato Ahok, BKW menyebutkan ada 14 kata yang berkaitan dengan pilkada, di antaranya pada kalimat "Jangan pilih saya" dan "Kalau saya tidak terpilih, program jalan terus".

Menurut BKW, jumlah kata secara keseluruhan dalam pidato itu sekitar 2.987. Namun yang menyebut "Al-Maidah" dan "dibohongi" hanya muncul satu kali. Sedangkan kata yang paling sering muncul ialah "program" dan "ikan laut". Karena itu, BKW meyakini konteks pidato Ahok adalah mengenai program budi daya perikanan. Dalam kasus ini, BKW melihat ucapan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah hanya karena teringat soal pengalaman pilkada. Selain itu, penyebutan surat Al-Maidah tidak sampai satu menit. Ujaran tersebut hanya muncul selama dua detik dan itupun hanya merupakan letupan spontan dalam konteks pidato berapi-api. Kebalikan dari BKW, Mahsun, menganggap jika pidato Ahok di kepulauan seribu konteksnya adalah pilkada namun dikemas secara bagus dalam bingkai program budi daya ikan. Hal ini dimungkinkan karena Ahok sedang berusaha untuk membangun citra dengan cara menonjolkan program-programnya yang dinilai inovatif dan pro rakyat. Dari dua analisis tersebut, dapat disimpulkan jika para ahli bahasa tidak satu suara dalam menafsirkan kasus pidato Ahok dan hal ini sangatlah wajar dikarenakan bahasa tidak monolitik keberadaannya sehingga penafsiran atas suatu ujaran juga bisa bermacam-

macam. Untuk itu, dalam tulisan ini penulis juga berupaya untuk memberikan pandangannya terkait pidato Ahok tentunya dengan berusaha mengedepankan sisi obyektivitas dalam analisisnya. Dengan mempertimbangkan beberapa uraian di atas, analisis atas pidato Ahok di kepulauan seribu dengan menggunakan perspektif ilmu linguistik, masih relevan dan menarik untuk dilakukan.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah utama ucapan Ahok bukan pada aktif-pasifnya kalimat, alias bukan pada tata bahasanya (karena belakangan ini ramai tersebar meme yang membahas kalimat aktif dan pasif). Dalam pengajaran bahan-bahan ajar bahasa, biasanya diurutkan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kalimat aktif diberikan mendahului kalimat pasif karena secara teoretis kalimat aktif adalah kalimat dasar, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat turunannya melalui proses pemasifan (Wijana, 2011: 21). Pada kasus ini, bentuk aktif maupun pasif sebenarnya sama saja, yg membedakan hanya konstruksi pasif, tidak membutuhkan pelaku/aktor. Melalui pemakaian kalimat pasif, aktor dapat tidak hadir dalam tuturan/teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat yang berstruktur aktif (Eriyanto, 2009: 156). Dibohongi Surat Al-Maidah (dibohongi "oleh" Surat Al-Maidah), dibohongi pakai Surat Al-Maidah (kalau ditulis agak panjang secara imajiner mungkin: dibohongi pakai Surat Al-Maidah "oleh" oknum), Al-Maidah sebagai alat. Oknum ini bisa bermacam-macam. Bisa ulama, politikus, lawan politik Ahok, intinya siapapun yg sering *bawa-bawa* Surat Al-Maidah untuk menentang Ahok jadi Gubernur. Kalau ingin dicari letak kesalahan Ahok akibat penggunaan konstruksi pasif ini, tentu saja karena pada akhirnya khalayak lebih tertarik untuk melihat Al-Maidah daripada pelaku (karena pelaku/aktor hilang dari kalimat). Padahal, pelaku "yang berbohong" adalah hal yang sangat penting dan sebetulnya layak diketahui oleh khalayak. Bentuk kalimat pasif yang menghilangkan pelaku dari kalimat akhirnya membuat khalayak menjadi marah, tesseinggung, maupun keberatan. Masyarakat akhirnya hanya memikirkan Surat Al-Maidah daripada pelaku, padahal mungkin maksud Ahok menyampaikan hal yang demikian adalah untuk menunjukkan kepada Ibu-Ibu (di TKP) bahwa ayat-ayat Qur'an telah dipolitisir. Akibat kesalahan Ahok memilih konstruksi/bentuk kalimat, pelaku dapat bersembunyi karena tidak mendapat perhatian yang memadai. Seandainya Ahok menggunakan kalimat aktif, mungkin akan lain ceritanya. Dengan konsekuensi bahwa Ahok harus menyebutkan pelaku yang menggunakan surat Al-Maidah untuk berbohong.

Masalah yang menurut penulis lebih membuat khalayak marah daripada “sekedar” persoalan tata bahasa adalah makna konotasi yang terkandung dalam suatu kata. Makna konotatif adalah makna emotif yang dapat dibangkitkan oleh sebuah kata. Sebenarnya, makna konotasi yang sifatnya emotif ini bersifat personal namun karena masing-masing individu dimungkinkan memiliki pengalaman yang sama, dimungkinkan pula setiap orang –khususnya yang merupakan anggota komunitas bahasa yang sama– memiliki konotasi-konotasi yang sama (Wijana, 2015: 26). Wanita misalnya, lebih suka dikatakan langsing daripada kerempeng, padahal secara denotatif maknanya sama, yang membedakan tentu saja unsur emotif yang dibawa oleh kata tersebut. Kata *dibohongi* yang digunakan oleh Ahok, tentu saja memiliki nilai emotif yang tidak membuat pendengarnya senang, dengan kata lain, konotasinya negatif. Pilihan kata sejenis mungkin seperti kata *ditipu*, *dikadali*, *diperalat*, *diperbudak*, *dibodohi* dsb, yang kesemuanya berkonotasi negatif. Konotasi negatif inilah yg membuat banyak orang menjadi marah dan merasa ternista. Masalah selanjutnya adalah siapa yg berbicara dan berbicara apa. Misal, penulis adalah orang Jawa dan membuat *guyonan* tentang Jawa, tentu tidak masalah. Beda cerita kalau penulismembikin olok-olok tentang Madura, orang bisa salah faham dan menganggapnya sebagai suatu stereotiping, etnosentris, dan bahkan rasis. Letak kesalahan fatal Ahok ada di sini. Sebenarnya, menyampaikan ayat ketika kampanye sudah jamak dilakukan. Penulis ingat dulu pernah mendengar jurkam suatu partai sedang kampanye *bawa-bawa* ayat tentang pohon agar warga tidak *nyoblos* salah satu partai. Anggap saja itu *guyonan* atau pemanis kampanye, tapi menjadi tidak bermasalah, sama seperti ketika orang Jawa bikin olok-olok tentang sukunya sendiri. Menjadi masalah apabila yang mengatakannya adalah orang di luar itu (out-group, meminjam istilah van Dijk adalah “them”). Perihal US vs THEM inilah yang akhirnya menjadi ramai seperti saat ini. Pihak “kita” pada akhirnya menganggap pihak “mereka” telah menistakan agama karena membawa ayat dari kitab suci agama “kita”.

Terakhir, mengikuti prinsip dasar pragmatik bahwa suatu ujaran sangat terikat konteks. Sudah sangat benar jika saksi kunci dugaan penistaan agama seharusnya adalah masyarakat di kepulauan seribu, yang hadir langsung, berada di waktu yang sama, dan menghirup udara yang sama dengan Ahok ketika dugaan penistaan tersebut terjadi. Karena ketepatan memahami konteks dari suatu ujaran –terutama konteks situasi- hanya yang

diajak bicaralah yang paling bisa mengerti dan memahami (Cutting, 2008: 5). Yang tidak hadir di sana, hanya "sekedar" dapat menafsirkan makna ujaran tersebut. Lalu bagaimana caranya menafsirkan bahwa ujaran Ahok adalah penistaan? Bisa dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh ujaran tersebut terhadap yang diajak bicara/pendengar. Jika khalayak yang mendengar langsung pidato tersebut tidak tersinggung, ataupun tidak merasa ternistakan, seharusnya perkara selesai di sana. Di Surabaya, ngobrol dengan bumbu-bumbu misuh itu biasa. Lantas apakah kita yang secara kebetulan mendengar obrolan tersebut, kemudin menghampiri orang yang sedang ngobrol untuk selanjutnya meminta petutur agar marah hanya karena kita merasa bahwa ujaran penutur tersebut dalam analisis kita adalah merupakan suatu bentuk penistaan?

### 3. Simpulan

Kasus yang menimpa Ahok sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa santun berbahasa, terutama di ranah publik, sangatlah penting. Sebisanya kita menghindari cacik maki dan sumpah serapah, apalagi di media sosial yg anak-anak kecil juga bisa mengakses untuk kemudian gaya bahasa kita menjadi proyek percontohan mereka. Cukup generasi kita saja yg sering menebarkan kebencian, generasi selanjutnya jangan. Cukuplah "mereka" -yang berseteru- yang tidak santun berbahasa, kita jangan. Seperti peribahasa China yang sangat terkenal, *once a word leaves your mouth, you cannot chase it back even with the swiftest horse*. Betapa cepatnya efek yang diciptakan oleh bahasa, maka bijak berbahasa seharusnya menjadi harga mati. Nenek moyang bangsa melayu sudah lama menanamkan ini, namun acapkali kita lupa bahwa yang kurik kundi, yang merah saga; yang baik budi, yang indah bahasa. Bahan renungan untuk penulis juga.

### REFERENSI:

- Cutting, Joan. 2008. *Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students*. New York: Routledge.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hemeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN-Malang Press.
- Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- van Dijk, Teun A. 2004. *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction*. Barcelona: Pompeu Fabra University.
- Wijana, I Dewa Putu. 2011. *Berkenalan dengan Linguistik*. Yogyakarta: A.Com Advertising.
- Wijana, I Dewa Putu. 2015. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.